

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adnan Djamal, 2009, Konfigurasi Politik dan Hukum Institusionalisasi Judicial Review di Indonesia, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Aminuddin Ilmar, 2014, Membangun Negara Hukum Indonesia, Makassar: Phinatama Media.
- Bagir Manan, 1989, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Bandung: LPPM Unisba.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1979, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, Bandung: Alumni.
- HR, Ridwan, 2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irvan Mawardi, 2014, Dinamika Sengketa Administrasi di Pemilukada, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Jenedjri M Gaffar, 2013, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Ashiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, Perihal Undang-Undang., Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Jakarta: Raja Grafindo.
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang Bayumedia Publishing.
- Maria S.W. Sumardjono, 2019, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media.
- Priyatmanto Abdoellah, 2016, Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- R Wiyono, 2007, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Peratama, Jakarta: Sinar Grafika.
- SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Malang: Setara Press.
- Sorjono soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Rosdakarya.

Teguh Satya Bhakti, 2017, Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha.

Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

PUTUSAN:

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 31/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 115/PHPU.D-XI/2013.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor. 82/G/2020/PTUN-JKT.

JURNAL DAN ARTIKEL:

Dola Riza, 2018, Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 1.

Francisca Romana Harjiyatni dan Suswoto, 2017, Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol 24.

Lembaga Quasi Peradilan Etik, Jurnal Fundamental Vol. 10 No. 2.

Idul Rishan, 2017, “Jurnal Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik”, Bandung: Dialogia Iuridica Volume 9 No.1.

Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, 2021, Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Vol. 37, No.2.

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Paper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004, dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Jimly Asshiddiqie, 2015, “Jurnal Etika dan Pemilu”, Jakarta: DKPP RI Volume 1 No.1.

Maftuh Effendi, 2014, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1.

SKRIPSI DAN TESIS:

ABD Rahim H Jangi, S.H., 2017, Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Rizman Hadiwijaya, 2020, Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengangani Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Skripsi, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

WABSITE:

Jimly Asshiddiqie, “Pengenalan Tentang DKPP dalam Rangka Penegakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu”, diunduh pada tanggal 14 Mei 2021
http://www.jimly.com/makalah/namafile/171/Pengenalan_DKPP_para_Hakim_Agung_dan_Hakim_Tinggi.pdf.

<https://dkpp.go.id/>

<https://sipp.ptun-Jakarta.go.id/>